

## **Refleksi Pendidikan Politik Era Kebangkitan Nasional Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer**

Wetri Yanti, Reno Fernandes, Suryanef Suryanef

Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [rafaelasykari@gmail.com](mailto:rafaelasykari@gmail.com)

### **Abstrak**

Era Kebangkitan Nasional adalah periode penting bagi pembentukan identitas nasional Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya kemerdekaan, persatuan, dan partisipasi politik rakyat. Refleksi terhadap pendidikan politik pada masa ini tidak hanya menyimpan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan demokrasi tetapi juga relevan dengan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kontemporer di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kembali nilai-nilai politik era Kebangkitan Nasional serta merumuskan relevansinya dalam membangun warga negara aktif, kritis dan demokratis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif historis dan studi pustaka, kajian ini merefleksikan pentingnya integrasi nilai nasionalisme kritis, partisipatif dalam pelajaran PKn. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kesadaran berbangsa, partisipasi aktif, dan solidaritas sosial perlu dimaknai ulang dalam pembelajaran PKn. Kajian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam merumuskan nilai-nilai pendidikan politik era Kebangkitan Nasional sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan modern. Temuan ini merekomendasikan penguatan nilai-nilai nasionalisme historis dalam praktik pembelajaran PKn abad ke-21.

Kata Kunci: Kebangkitan Nasional;; Nasionalisme; Pendidikan Kewarganegaraan; Pendidikan Politik.

### **Abstract**

The National Awakening was an important period for the formation of Indonesia's national identity. It was marked by a growing collective awareness of the importance of independence, unity, and political participation of the people. Reflections on political education during this period not only preserve the values of struggle, nationalism, and democracy but are also relevant to the development of contemporary Civic Education (PKn) in Indonesia. This article aims to re-examine the political values of the National Awakening era and formulate their relevance in building active, critical, and democratic citizens. Using a historical descriptive-qualitative approach and literature review, this study reflects on the importance of integrating critical and participatory nationalist values into PKn lessons. The findings indicate that values such as national consciousness, active participation, and social solidarity need to be reinterpreted in PKn education. This study can contribute new insights into formulating the political education values of the National Awakening era as the foundation for modern citizenship education. The findings recommend strengthening historical nationalist values in 21st-century PKn education practices.

Keywords: Civic Education; Nationalism; National Awakening; Political Education.

How to Cite: Yanti, W., Fernandes, R. & Suryanef, S. (2025). Refleksi Pendidikan Politik Era Kebangkitan Nasional Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(2), 65-75.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Pendidikan politik pada hakikatnya merupakan dua konsep yang memiliki hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi. Melalui pendidikan dan pengajaran manusia dapat mengambil Keputusan yang tepat demi kemaslahatan banyak orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan politik dapat mempengaruhi sistem pendidikan dari proses hingga mencapai tujuan dipengaruhi oleh kebijakan politik. Sehingga dapat dimaknai bahwa pendidikan dan politik saling terkait dan saling mempengaruhi. Pendidikan yang baik menjadikan manusia sebagai pengambil kebijakan yang baik dan tepat sasaran serta kebijakan politik yang baik dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan (Fernandes, 2023)

Sekolah sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pendidikan memainkan peranan penting dalam pendidikan politik kepada peserta didik. Sejarah mencatat bahwa kaum terpelajar adalah pembawa obor dalam menerangi perjalanan gelap perjuangan meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kesadaran politik tidak muncul serta merta karena penjajah melanggengkan kebodohan untuk mengabadikan kekuasaan mereka ditanah jajahan.

Kebijakan politik etis adalah tonggak bagi kaum pelajar untuk menyadari bahwa ada alam lain yang disebut dengan kesetaraan, kebebasan, dan kemerdekaan untuk terlepas dari jerat penindasan dan pengkerdilan (Susilo & Isbandiyah, 2018). Hal ini sejalan dengan dunia perpolitikan modern. Hal ini memiliki benang merah pendidikan politik era modern. Kebebasan pendapat menjadi landasan utama dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan pendapat tidak lagi dilandasi nilai-nilai perjuangan untuk menjembati kesatuan dan persatuan. Sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai perjuangan era kebangkitan dalam pendidikan kewaragnegaraan. Hal ini menjadi penting, untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik dan etika politik yang benar (Ulfah et al., 2021).

Meskipun banyak kajian yang membahas sejarah pendidikan nasional, namun masih terbatas kajian yang mengaitkan nilai-nilai politik Era Kebangkitan Nasional dengan Kurikulum PKn saat ini. Lalu, bagaimana pendidikan politik dalam Era Kebangkitan Nasional berperan dalam membentuk kesadaran politik? Apa relevansinya bagi pendidikan politik saat ini?

## Kajian Teori

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan kedudukannya sebagai warga negara (Prayugo, 2022). Pendidikan politik merujuk pada proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar politik dan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik berfokus pada pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, debat public dan advokasi kebijakan. Tujuan pendidikan politik adalah untuk mengembangkan kesadaran politik, pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, pengetahuan tentang sistem politik, dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat demokratis. (Fernando & Sirozi, 2024)

Individu hidup dalam masyarakat dengan tujuan yang sama yakni menjadi manusia yang seutuhnya. Akan tetapi, pada kenyataannya di masyarakat proses humanisasi ini tidak berjalan mulus. Kelas sosial yang terbagi antara kelas penindas dan kelas tertindas yang disebut Freire "*Prescription*" menghasilkan ketimpangan kuasa yang nyata. Melalui pengaturan kelas penindas, menyebabkan hilangnya kelas tertindas sebagai subjek sejarah. Sehingga menurut Paulo Freire diperlukan adanya kesadaran kritis dari kaum kelas tertindas untuk keluar dari kekangan penindas. Kesadaran kritis diperoleh dari kemampuan manusia untuk mengamati realitas sehingga muncul tindakan aksi-refleksi dari realitas. Pemahaman terhadap realitas berperan besar terhadap kesadaran manusia yang dimanifestasikan dalam tindakannya. Freire menempatkan pendidikan sebagai alat pembebasan (Bethari, 2024).

Tiga tahap kesadaran Freire, menunjukkan bahwa pemahaan tentang realitas berperan besar terhadap kesadaran manusia yang dimanifestasikan dalam tindakannya. Pemahaman manusia menuntut adanya tindakan yang menurut freire terciptanya hubungan antara konsep praksis, yaitu hubungan dialektis yang berkelanjutan antara aksi dan refleksi dan konsep dialog. Dialog merupakan bukti pengakuan manusia sebagai subjek sejarah yang mengakui manusia sebagai subjek otonom. Dialog sebagai bukti pengakuan kesetaraan bagi tiap individu dalam proses penyadaran

Kata *conscientização* menurut Freire memiliki makna yang mendalam, karena ia benar-benar yakin bahwa pendidikan adalah sebagai praktik kebebasan. Sebagai suatu tindakan sebuah langkah kritis menuju realitas. Hal ini dimaknai sebagai proses dimana manusia bukan sebagai penerima pasif, melainkan subjek yang mengetahui, mencapai

kesadaran yang semakin dalam, baik terhadap realitas sosial budaya yang membentuk hidup mereka maupun terhadap kapasitas mereka untuk realitas tersebut. (Lake, 2013)

Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *Agent of Change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penggerak perubahan, pemberi solusi, pemberi pertolongan dan penghubung dengan sumber-sumber pemecah masalah. Pemuda dalam hal ini adalah aset yang menentukan harapan dan masa depan bangsa (Alvira et al., 2021).

Menurut Freire, pendidikan adalah proses pembebasan. Setiap hubungan dominasi, pemerasan, dan penindasan selalu memuat kekerasan, baik dilakukan dengan cara drastic maupun tidak. Dalam hubungan semacam ini penindas maupun yang tertindas sama-sama mengalami dehumanisasi. Sehingga pendidikan pembebasan berupaya untuk membebaskan manusia di dalam kehidupan riil dari penindasan yang mencekik mereka (Abidin, 2022).

Pemuda yang sadar politik tidak muncul begitu saja. Pendidikan mengambil peranan penting sebagai jembatan pemahaman terhadap tumbuhnya rasa nasionalisme itu. Di Indonesia, pendidikan politik telah diramu sejak tahun 1908, dengan adanya masa kebangkitan Nasional, keberadaan akan negara Indonesia yang dicita-citakan mulai ditanamkan dan diberikan kepada masyarakat Nusantara. Pasca kemerdekaan, materi pendidikan politik diberikan melalui pelajaran kewarganegaraan (*Civic Education*) lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada era Orde Baru dan kemudian kembali menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Era Reformasi (Handoyo, 2017).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai refleksi kritis dan tematik terhadap kontribusi pendidikan dan organisasi pelajar era Kebangkitan Nasional. Pada Penelitian ini penulis menggunakan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif historis dengan menggunakan metode *library research* terhadap artikel, buku sejarah dan kebijakan pendidikan pada era kolonial dan pascakemerdekaan. Pada penelitian ini penulis menyajikan analisis atas data-data yang relevan dengan topik yang penulis teliti. Sumber data dari penelitian ini menggunakan identifikasi kolaboratif literatur dengan menelusuri artikel dan buku yang melalui perpustakaan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam, reflektif, dan berimbang mengenai dinamika politik

Indonesia, serta menyumbang secara ilmiah pada kajian politik dan pemerintahan di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pendidikan sebagai Alat Kesadaran Politik**

Politik etis merupakan salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Tiga kebijakan yang diterapkan yaitu pembangunan irigasi, menyelenggarakan emigrasi dan memberikan pendidikan kepada kaum pribumi. Walaupun penyelenggaraan pendidikan diarahkan agar bergaya Eropa dan memakai bahasa Belanda. Pada tahun 1900, tiga *hoofdenscholen* sekolah pada kepala yang lama di Bandung, Magelang, dan Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai pemerintah yang diberi nama OSVIA (*Opleidingscholen voor inlandsce abtenaren*, Sekolah pelatihan untuk pejabat pribumi). Pribumi diajari cara melaksanakan kewajiban dalam birokrasi pemerintahan kolonial Belanda (Sinaga et al., 2024; Rangga Galih, 2017).

Pelaksanaan politik etis membawa dampak paling signifikan adalah program pendidikan. Kebijakan mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi tanpa disadari merupakan langkah awal dalam menumbuhkan bibit perjuangan pemuda di Indonesia. Melalui sekolah yang didirikan Belanda, melahirkan pemuda-pemuda intelek yang berpikiran maju dan setara dengan bangsa barat lainnya. Pada dekade abad XX sudah banyak orang bumi putera yang pandai baca tulis, meskipun hanya terbatas golongan bangsawan dan priyayi Jawa saat itu. Politik etis memberikan pendidikan bergaya Eropa dan pemakaian bahasa Belanda (Perdana & Adi, 2022). Mayoritas pribumi yang diperbolehkan sekolah adalah kalangan anak bangsawan pribumi. Namun pemuda lulusan sekolah menengah dan sekolah tinggi kehakiman, kedokteran dan teknik kemudian menjadi pioner dalam pergerakan emansipasi kemerdekaan (Susilo & Isbandiyah, 2018). Para pemuda penghimpun gerakan perlawanan yang disuarakan melalui pembentukan organisasi-organisasi yang kemudian menyusun menyebarkan narasi kemerdekaan dan keinginan untuk keluar dari penindasan pemerintah kolonial.

### **Peran Kaum Terpelajar dan Organisasi Pelajar**

Pendidikan pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam menciptakan tenaga ahli dan terampil. Pendidikan pada masa itu didasarkan paa golongan kebangsaan saat itu. Ada perbedaan yang jauh antara anak-

anak bumiputera dengan anak-anak Belanda atau Eropa. Sistem pendidikan pun dibedakan menjadi sistem pendidikan tradisional yang dilakukan di pesantren-pesantren dan sistem pendidikan sekuler yang dibawa oleh Belanda (Sultani & Kristanti, 2020).

Melalui Budi Utomo, Dr. Wahidin dalam ceramahnya terus berupaya untuk memperjuangkan biaya pendidikan bagi anak pribumi yang pandai dengan sebuah badan bantuan pendidikan bernama *studifont* (Husda, 2020). Pendidikan membuat kaum terpelajar akhirnya menyadari bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan, kaum pribumi harus merasakan pendidikan sebanyak mungkin. Pemikiran bahwa orang pribumi harus memimpin negerinya sendiri bukan lagi dianggap sebagai golongan kelas rendah.

Berbagai organisasi bermunculan sebagai sarana mengumpulkan kekuatan kaum terpelajar dan menyebarkan semangat anti penjajahan. Seperti halnya Budi Utomo yang didirikan pelajar STOVIA yang fokus membina generasi muda untuk mendapatkan pendidikan selayaknya golongan kelas sosial yang lebih tinggi. Sehingga organisasi yang diinisiasi oleh pelajar kemudian lebih terbuka untuk masyarakat umum. Budi Utomo menjadi sarang bagi kaum intelektual untuk membahas isu-isu nasional serta menghimpun kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Media pers digunakan sebagai sarana menyebarkan isu-isu persatuan dan kesadaran nasional melalui surat kabar (Siagian et al, 2024).

Selanjutnya, mulai bermunculan organisasi lain seperti Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat ditengah dominasi pedagang Cina yang didukung pemerintah. Kemudian berganti menjadi organisasi Sarekat Islam yang bertujuan membebaskan segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial.

### **Transformasi Pendidikan Politik**

Tujuan pendidikan politik adalah untuk mempersiapkan manusia yang melek politik, sehingga menjadi sadar politik, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pendidikan dan pengajaran tentang politik. Namun, lebih kepada membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik yang dapat membentuk kesadaran politik bagi warga negara (Fernando & Sirozi, 2024) (Handoyo, 2017).

Sebelum era 1900, ciri perjuangan atau perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di Nusantara bersifat kedaerahan, bergantung pada tokoh kharismatik, dan belum ada tujuan yang jelas. Setelah 1900 perjuangan rakyat bersifat

nasional, diplomasi dan perjuangan dengan organisasi modern (Ahmadin, 2022). Hal ini disebabkan oleh kebijakan di bidang pendidikan yang pada akhirnya membawa dampak kontraproduktif terhadap pemerintah kolonial Belanda karena dengan munculnya kelompok-kelompok terdidik, ternyata menjadi faktor pendorong tumbuhnya rasa nasionalisme (Sultani & Kristanti, 2020).

Perubahan ini tercermin pada tujuan pendidikan politik masa itu adalah membentuk kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memberi kesadaran bahwa penderitaan, penindasan dan pembodohan yang dialami rakyat rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkan. Seseorang yang sudah memiliki pendidikan politik memiliki kebijaksanaan yang tinggi dalam menentukan arah dan tujuan bersama (Rahmiyati Mii, 2023). Hal ini bermakna bahwa warga negara yang sadar tidak dapat serta merta diwujudkan dalam waktu yang singkat. Pendidikan politik harus ditanamkan dan dipupuk sejak dini. Pendidikan politik melalui metode *integrated learning* dengan mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi pondasi awal dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, musyawarah mufakat dan partisipasi dalam mengambil keputusan di tingkat sekolah dasar. (Setiawati et al., 2024). Pendidikan kewarganegaraan secara esensial merupakan proses yang disengaja dan direncanakan untuk meningkatkan intelektual dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara menanamkan identitas dan nilai moral ke dalam diri warga negara (Rosa et al., 2024). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka partisipasi aktif dan kesadaran berdemokrasi dari setiap warga negara menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa bangsa, termasuk lembaga pendidikan, untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tertanam kuat dalam sanubari setiap generasi penerus bangsa.

Saat ini, sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap politik sebagai entitas yang kurang populer, bahkan dibenci. Hal ini disebabkan oleh perilaku tokoh politik yang tidak konsisten serta penuh kontroversi (Wangsih, 2024). Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini tidak didasari moral namun hanya berdasarkan pada rasio, nafsu berkuasa, ambisi, konflik, kekerasan, dan menghalalkan segala cara. Pelaksanaan sistem demokrasi tidak lagi dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga hal ini seringkali menimbulkan respon kontra yang beragam di tengah masyarakat (Ulfah et al., 2021). Pancasila seharusnya dijadikan

sebagai sumber etika demokrasi secara normatif mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi sejati tidak hanya memerlukan hukum, peraturan, dan lembaga yang menegakkan, tetapi juga memerlukan warga negara yang baik. Sehingga memiliki sikap demokratis yang didukung oleh etika dalam berdemokrasi. Secara substantif, diperlukan usaha untuk mendidik warga negara yang baik guna menjaminn terwujudnya masyarakat demokratis. Pendidikan politik yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganeraan diperlukan dengan tuujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang memiliki etika demokratis.

Indonesia harus dihentikan. Rasa senasib dan sepenanggungan telah membentuk sikap anti-penjajah dan melahirkan cita-cita nasional dengan identitas baru sebagai rakyat Indonesia. Dalam hal ini, sekolah memainkan peranan penting dalam menyebarkan nilai-nilai politik seperti Stovia yang melahirkan Boedi Oetomo, Sarekat Dagang Islam hingga merembet ke organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Organisasi dilahirkan dengan tujuan memerdekakan pikiran, melindungi ekonomi, mempertahankan budaya, mengajarkan agama hingga tujuan akhirnya adalah membentuk persatuan nasional. Usaha ini dilakukan secara terorganisir sehingga disebut sebagai sebuah pergerakan nasional (Pratama, 2022). Jika sebelumnya narasi pendidikan politik disebarkan melalui media surat kabar dan radio maka saat ini pendidikan politik telah bertransformasi melalui seminar, workshop, dan media digital seperti situs web, podcast, dan sosial media(Prayugo & Prayitno, 2022).

### **Relevansi terhadap Pendidikan Politik Masa Kini**

Era Pergerakan Kebangkitan Nasional memang telah berlalu. Tetapi nilai-nilai pendidikan politik yang pernah ditunjukkan dimasa itu tidak boleh terlupakan. Semangat untuk memahami situasi politik dan membangun kesadaran politik tetap relevan dengan situasi saat ini. Penjajahan bukan lagi pada tatanan fisik yang dapat diidentifikasi dengan mudah tetapi penjajahan melalui pengkerdilan pemikiran dan jurang kesenjangan ekonomi kian terasa. Kemiskinan menjadi masalah besar yang menyebabkan terhambatnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Fabela & Khairunnisa, 2024). Terlebih, para pemimpin hari ini telah kehilangan sensitivitas atas nasib rakyat yang bergulat dengan kemiskinan. Sebagian uang bagi perbaikan nasib rakyat miskin dicuri dalam praktik korupsi yang semakin kompleks dari pusat hingga ke daerah(Syawie, 2011).

Hari ini, rakyat Indonesia tidak berjuang melawan bangsa asing, tetapi oknum pemerintahan yang gagal membentuk udara politik yang sehat. Warga negara perlu

edukasi politik dari tingkat sekolah agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga, pendidikan politik tetap dibutuhkan untuk memahami segala proses politik dalam pengambilan kebijakan. Akhirnya, penyelenggaraan negara dapat dikawal sesuai dengan kehendak rakyat bukan penguasa.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan karakter bangsa yang bermartabat dan berkepribadian. Melalui pendidikan, generasi muda dibentuk dan dibekali dengan nilai-nilai luhur, pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu aspek yang berperan penting dalam menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, cerdas, dan sadar hak serta kewajibannya adalah melalui pendidikan politik. Pemahaman politik membantu membentuk identitas kewarganegaraan sejak usia dini. Kemampuan berbicara dan berpendapat dapat menunjukkan keterampilan dan ekspresi diri.

Salah satu strategi implementasi nilai-nilai historis ke dalam pembelajaran PKn dalam Kurikulum Merdeka dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) elemen Berkebhinekaan Global. Pendidik dapat memilih tema “Bangunlah Jiwa dan Raganya”. Guru mendorong peserta didik untuk mengenal tokoh-tokoh masa Kebangkitan Nasional dan nilai-nilai perjuangan yang menyertainya. Lalu merefleksi apa makna kebangkitan bagi generasi saat ini. Melalui kegiatan P5 peserta didik dapat mengenali perjalanan sejarah bangsanya dan mengaitkan keterhubungan masa lalu dengan kehidupan mereka di masa kini.

## **Kesimpulan**

Pendidikan politik pada era Kebangkitan Nasional tidak hanya berkontribusi pada kemerdekaan, tetapi juga pada pembentukan identitas politik dan nasionalisme. Nilai-nilai pendidikan politik tersebut tetap relevan sebagai landasan pendidikan kewarganegaraan modern. Diperlukan kebijakan pendidikan yang mendorong literasi politik sejak usia sekolah untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada pendekatan historis yang belum menyertakan perspektif lapangan dari pendidik atau peserta didik. Studi lanjutan di sarankan menggabungkan pendekatan kualitatif lapangan untuk menilai pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai politik sejarah dan bangsa..

Upaya untuk mengurangi dampak negatif FoMO dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran diri, membangun hubungan sosial yang sehat di dunia nyata, serta mengurangi ketergantungan terhadap media sosial. Dengan pendekatan yang tepat, remaja dapat lebih fokus pada pengembangan diri dan kesejahteraan emosional

mereka, sehingga dapat menghindari dampak negatif dari fenomena ini. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari individu, keluarga, dan lingkungan sekitar dalam membantu remaja mengelola FoMO secara lebih sehat dan adaptif.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2022). *Paulo Freire: Pedagogi Kritis dan Penguatan Civil Society di Indonesia*. Diva Press
- Ahmadin, *Sejarah Pergerakan Nasional*, 2017. Rayhan Intermedia
- Alvira, S., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9201–9207.
- Bethari, R. A. (2024). *Eksistensi Dan Kebebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire : Menuju Humanisasi Melalui Kesadaran Kritis*. 30, 1–12.
- Evaluation, L., Sinaga, R., Lubis, S., Wisabla, N., Raunaq, U. S., Sejarah, J. P., Sosial, F. I., Medan, U. N., Medan, K., & Utara, P. S. (2024). *Politik Etis : Dari Eksploitasi Ke Emansipasi di Era Kolonial*. 1(2), 286–293.
- Fabela, Z., & Khairunnisa, A. (2024). Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 3158–3164. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3004>
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2024). Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10994–11000. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.2314>
- Husda, H. (2020). Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional. *Jurnal Adabiya*, 21, 31. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v21i2.6609>
- Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2024). *Publisher: CV. Digazeebook Media*. 2(2), 82–90. *Page\_625*. (2024). 625–635.
- Pratama, Py. P. R. A. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. *Lakeisha*, 2. [http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA %20edit danar%29 Rev 2.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH%20PERGERAKAN%20NASIONAL%20INDONESIA%20edit%20dinar%20Rev%202.pdf)
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>

- Rahmiyati Mii, et al. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 3(2), 144.
- Rangga Galih, D. (2017). Dhimas Rangga Galih. *Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 751–765.
- Setiawati, I., Mahfuroh, L., & Azhas, N. F. (2024). *Pentingnya Pembelajaran PKN SD Untuk Menumbuhkan Kesadaran Berdemokrasi Sejak Dini*. 3, 1–10.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3518>
- Susilo, A. &, & Isbandiyah. (2018). POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA A. *Historia*, 6(2), 403–416.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Sosio Informa*, 16(3), 213–219. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1576>
- Wangsih, (2024). *Pendidikan Politik dalam Dinamika Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia*, Cv. Budi Utama